MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 589/DJMT.1/ST.KP7.1/XI/2025

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

Dasar : Nota Dinas Kepala Bagian Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1384/DJMT.1/KP7.1/ XI/2025 tanggal 14 November 2025 perihal Penerbitan Surat Tugas.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Jefri Ardianto, S.T., M.M./ 197704142009041005, Pembina (IV/a), Kabag Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat;
2. Teguh Ahmadi, S.E., M.M./ 198406262009041007, Pembina (IV/a), Kabag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat;
3. Siti Purwanti, S.H./ 199507062022032004, Penata Muda (III/a), Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan;
4. Fiqky Yofhani, S.H./ 198902102023211015, IX , Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama;
5. I Made Adhitya Widhiardana, S.H./ 199405262025211031, IX , Penata Layanan Operasional;
6. Nadia Sifa Auliya, S.Kom./ 199507122025212053, IX , Penata Layanan Operasional;
7. Ahmad Sabillah, A.Md./ 199211252025211042, VII , Pengelola Layanan Operasional;
8. Ardi Bagas Pratama, A.Md./ 199609122025211031, VII, Pengelola Layanan Operasional;
9. Jumanto/ 199312312025211062, V, Operator layanan Operasional.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi bertempat di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 19 sd. 21 November 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SODIKIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.